

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KECURANGAN  
LAPORAN KEUANGAN**

*(Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2015-2017)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**FEBY PRISWITA**

**NIM/BP : 15043076/2015**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2015-2017)**

Nama : Feby Priswita  
NIM/TM : 15043076/2015  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Keuangan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 20 Desember 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Salma Taqwa, SE, M.Si  
NIP. 19730723 200604 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA  
NIP. 19800103 200212 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Diryatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : **Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap  
Kecurangan Laporan Keuangan (Studi  
Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  
2015-2017)**

**Nama** : **Feby Priswita**

**NIM/TM** : **15043076/2015**

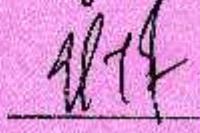
**Program Studi** : **Akuntansi**

**Kebhlian** : **Keuangan**

**Fakultas** : **Ekonomi**

Padang, 20 Desember 2019

**Tim Penguji**

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Salma Taqwa, SE, M.Si	1. 
2	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	2. 
3	Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Priswita  
NIM/Tahun Masuk : 15043076/2015  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 08 Oktober 1996  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Keuangan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Kelapa Gading Raya No.26a  
No. HP/Telp : 081267865565/-  
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 20 Desember 2019

Yang Menyatakan



**Feby Priswita**  
**15043076/2015**

## ABSTRAK

**Feby Priswita, 15043076/2015. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan”. Skripsi. Padang; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Pembimbing : Salma Taqwa, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Studi ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan tahun 2015-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 31 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua mekanisme tata kelola perusahaan seperti kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan pelaporan keuangan yang curang.

**Kata kunci: Kecurangan Laporan Keuangan, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia untuk menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi S-1 Keahlian Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesainya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah menjadi pemimpin di institusi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1, Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memperlancar penulis dalam menjalani dan menyelesaikan perkuliahan sampai akhirnya ke tahap ini.
5. Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulisa dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku Dosen Penguji I dan Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua (Papa Feri dan Mama Witriati) tercinta yang telah memberikan kesungguhan do’a dan

dukungan, bantuan moril dan materil kepada penulis. Terima kasih sudah selalu menyemangati dan mendukung segala kegiatan yang penulis lakukan baik kegiatan dikampus maupun diluar kampus. Juga kepada nenek yang sangat penulis hormati dan cintai Nyonya Syamsimar, yang telah mendukung penulis dari awal masa perkuliahan sampai berakhirnya masa perkuliahan ini, yang selalu memberikan semangat disaat penulis *down*, dan yang selalu bersedia membantu segala kesusahan penulis. Serta kepada orang tua kedua penulis (Bunda Id dan Ayah Eri) yang tidak pernah bosan memberikan semangat, dukungan serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Saudaraku, Dimas dan Dini yang menjadi moodboster ku disaat stress dalam menjalankan skripsi, serta barisan para sepupu yang masih bocah semua, terutama Alesha tersayang yang selalu menyemangati hari-hari penulis dengan canda tawanya yang gemesiiiiin, yang membuat betah dirumah hanya untuk bermain dengannya seharian untuk menghilangkan stress. *I'm gonna miss ur childhood* syasya.
9. Teruntuk manusia ter-*special* nan absurd, ter-*favorite* nan gaje, tergokil dan “tampan” katanya, Tegar Sepri Baihaqi, *IFH*. Manusia yang selalu ada disaat ku butuh, yang selalu membantu tanpa pamrih, yang selalu mengerti disaat susah, yang selalu menyemangati dan memberi nasehat. *Moodbooster* terbaik yang pernah ada. Banyak kata yang tidak bisa ku ungkapkan disini, banyak pengalaman yang telah kita lalui bersama, terima kasih sudah menjadi bagian dari salah satu masa menyenangkan dihidupku. Akhirnya fase baru dalam hidup kita benar-benar dimulai sekarang. Terimakasih sudah menemani susah-senang masa perkuliahan dan perskripsianku, berkat manusia ini masa perkuliahanku menjadi sangat menyenangkan.
10. Anak-anak komunitas “Young Perfection”, *Toxic people*-ku yang selalu menyemangati mandehnya ini untuk menyelesaikan skripsi. Kalian adalah *support system* yang sangat luar biasa. Kumpulan manusia halu yang selalu menemani *weekend* ku, tanpa kalian *weekend* ku menjadi sangat membosankan. *Keep solid* ya anak-anak ku.
11. Sahabat-sahabat “Simpang Girls” yang sudah menemani sejak hari pertama masa perkuliahan sampai berakhirnya masa perkuliahan ini. Ira cabat nackal ku, Ana eeq sang ceroboh yang suka sembarangan meletakkan barang lalu kehilangan, Ikah koor dari segala jenis acara yang dibuat untuk simpang, Wan-inda pemilik alis tersusah untuk dirapihkan, dan Fani yang langangnya tidak pernah berkurang. Serta rekan-rekan “BanPT” yang sampai sekarang masih belum penulis ketahui apa maksud dari nama Squad kalian. Berkat kalian semua, suasana perkuliahan menjadi lebih menyenangkan.
12. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2015, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas ilmiah ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun apabila terdapat kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Agensi .....	10
2.1.2 Teori Fraud Triangel .....	11
2.1.3 Corporate Governance.....	13
2.1.4 Mekanisme Corporate Governance .....	16
2.1.5 Kecurangan Laporan Keuangan .....	23
2.1.6 Beneish M - Score .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
2.3 Kerangka Konseptual.....	34
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>

3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Populasi dan Sampel .....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	43
3.5.1 Variabel Dependen .....	43
3.5.2 Variabel Independen.....	44
3.6 Metode Analisis Data.....	46
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.6.2 Uji Regresi Logistik .....	46
3.6 Metode Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
4.1.1 Gambaran Umum BEI.....	50
4.1.2 Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur .....	51
4.2 Statistik Deskriptif .....	51
4.3 Uji Regresi Logistik .....	54
4.3.1 Regresi Logistik .....	54
4.3.2 Omnibus Test .....	55
4.3.3 Koefisien Determinasi .....	56
4.3.4 Pengujian Secara Simultan .....	57
4.3.5 Pengujian Secara Parsial .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63

5.2 Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3 Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 2	Kriteria Pengambilan Sampel.....	40
Tabel 3	Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 .....	41
Tabel 4	Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 5	<i>Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit</i> .....	54
Tabel 6	<i>Uji Overall Test Step 0</i> .....	55
Tabel 7	<i>Uji Overall Test Step 1</i> .....	55
Tabel 8	Koefisien Determinan .....	56
Tabel 9	Hasil Pengujian Secara Simultan .....	57
Tabel 10	Uji Hipotesis.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konseptual .....	38
----------	---------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Tabulasi Data .....	70
Lampiran 2 Hasil Olah Data SPSS .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah suatu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (IAI, 2009). Salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting adalah Laporan Laba/Rugi karena didalamnya terdapat informasi laba.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1*, informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu pemilik untuk memperkirakan *earnings power* perusahaan dimasa yang akan datang. Adanya penilaian kinerja tersebut mendorong pihak manajemen menjalankan aktivitas operasional perusahaan secara maksimal, sehingga dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat (Wicaksono, 2015). Namun, sering terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak prinsipal sehingga menimbulkan potensi terjadinya konflik yang nantinya dapat memancing terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Kecurangan pelaporan keuangan yang telah dijelaskan dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) no. 70 yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dalam efek yang timbul adalah ketidaksesuaian laporan keuangan, dalam semua hal yang material dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kecurangan pelaporan keuangan meliputi, yang pertama manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Kedua representasi yang salah atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. Ketiga salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, cara pengungkapan (PSA no. 70).

Tidak sedikit kasus – kasus kecurangan laporan keuangan di Indonesia yang telah terjadi, beberapa diantaranya adalah kasus PT. Waskita Karya (2009) yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan yang dilaporkan terdapat penggelembungan aset sebesar 5 Miliar (Triani, 2017), PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (2019) yang dikutip dari <http://investasi.kontan.co.id> diduga melakukan pelanggaran laporan keuangan setelah lembaga akuntan publik Ernst & Young (EY) mengeluarkan laporan audit investigasi yang salah satu hasilnya adalah terdapat dugaan *overstatement* pada laporan keuangan tahun 2017 sebesar 4 Triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap grup AISA dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp. 329 miliar pada EBITDA entitas *food*. Kasus

kemungkinan manipulasi laporan keuangan lainnya dari PT Garuda Indonesia Tbk (2019) yang dikutip dari <https://finance.detik.com> menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US\$ 239.940.000, yang diantaranya sebesar US\$ 28.000.000 merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal uang itu masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan.

Melihat peristiwa yang telah terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kecurangan pelaporan keuangan. Di era modernisasi seperti sekarang ini, ada sebuah sistem yang harus dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan yang sering pula disebut dengan *Good Corporate Governance*. Dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik, maka sistem ini diharapkan dapat mengatasi krisis keuangan maupun non keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis perusahaan.

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia dimulai pada tahun 1997, dimana pada saat itu Indonesia dan negara – negara di Asia Timur lainnya tengah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Lemahnya *good corporate governance* sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara- negara Asia (Johnson, dkk. 2000). Lemahnya sistem tata kelola perusahaan di Indonesia pada saat itu, menyebabkan beberapa perusahaan melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dan berkaitan dengan tujuan pengelolaan perusahaan yang baik sehingga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Salim (2015) mengatakan *corporate governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola risiko, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*. Peran *corporate governance* sangat diperlukan dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat memancing manajer perusahaan untuk melakukan kecurangan, sebaliknya jika sistem tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik, maka dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan definisi dari *corporate governance* tersebut, maka disimpulkan *corporate governance* berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Pemicu terjadinya kecurangan laporan keuangan salah satunya karena lemahnya sistem korporasi dalam perusahaan. Perusahaan dengan

sistem korporasi yang lemah berpotensi tinggi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Menurut Skousen *et al.*, (2009) Insiden kecurangan tertinggi yaitu terjadi pada perusahaan dengan sistem *corporate governance* perusahaan yang lemah.

Menurut Salim (2017) beberapa mekanisme *corporate governance*, seperti mekanisme internal yaitu kepemilikan manajerial dan dewan komisaris serta mekanisme eksternal yaitu komite audit dan kepemilikan institusional diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Dengan kata lain mekanisme internal dan eksternal *corporate governance* tersebut dapat berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* yang dapat terjadi diperusahaan. Dengan berjalannya kedua mekanisme tersebut secara bersamaan, maka sistem *corporate governance* perusahaan mencoba memotivasi manajer agar memaksimalkan nilai pemegang saham (Alexander dan Matts, 2003 dalam Wulandari 2006).

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial didalam perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak hati – hati, karena ikut menanggung konsekuensi dan tindakannya sedangkan dengan meningkatkan kepemilikan institusional adalah salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* yang berfungsi untuk mengawasi agen. Tugas pengawasan ini juga dilakukan oleh anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2001). Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka kemungkinan untuk manajer melakukan kecurangan laporan keuangan semakin rendah, karena dewan komisaris dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga manajer akan lebih berhati – hati untuk melakukan kecurangan. Dalam melakukan pengawasannya, dewan komisaris membentuk suatu komite yang disebut komite audit.

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan (Wicaksono, 2015). Tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen dalam upaya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil beberapa mekanisme *corporate governance*, seperti mekanisme internal yaitu kepemilikan manajerial dan dewan komisaris serta mekanisme eksternal yaitu komite audit dan kepemilikan institusional untuk dijadikan variabel dalam penelitian untuk menguji apakah dengan berjalannya kedua mekanisme tersebut secara bersamaan dapat mengurangi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan didalam perusahaan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*

dan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit dan efektivitas audit internal terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2008 – 2012. Penelitian ini memutuskan mengembangkan penelitian terdahulu tersebut dengan beberapa perbedaan diantaranya menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2015 – 2017, menukar alat ukur *fraud*, menambah jumlah populasi dan sampel, serta menambahkan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan menghilangkan variabel komposisi dewan komisaris independen dan efektivitas audit internal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap kecurangan laporan keuangan”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan?

2. Sejauhmana pengaruh peran dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Sejauhmana pengaruh peran komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Sejauhmana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Pengaruh peran dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Pengaruh peran komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan maka dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama pendidikan serta dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai mekanisme *good corporate governance* dan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar lebih memahami mekanisme *corporate governance* dalam mencegah dan menghalangi kecurangan dalam pelaporan keuangan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dari penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan, dimana nantinya dapat dijadikan suatu referensi yang akan terus dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori keagenan merupakan dasar pemikiran dalam memahami konsep *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih pemilik (prinsipal, dalam hal ini pemegang saham) mempekerjakan seseorang (agen) untuk melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan mereka dengan cara mendelegasikan beberapa kebijakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga teori agensi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami isu pengaruh *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*.

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa konflik ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan antara investor dengan manajer. Investor menilai kinerja manajemen berdasarkan dari laba yang dihasilkan perusahaan, sedangkan manajer berupaya memenuhi tuntutan investor dengan memaksimalkan laba perusahaan agar dapat memperoleh kompensasi yang besar. Perbedaan tujuan inilah yang mengakibatkan terjadinya *conflict of interest* antara pihak agen dan principal.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan antara investor dan manajer yang seperti ini dapat menyebabkan suatu kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Ini terjadi karena manajer lebih banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan investor yang tidak mengetahui informasi perusahaan secara keseluruhan sehingga hal itu dapat mendorong perilaku manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi dari investor. Dalam kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut, manajer berkesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dengan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan yang disajikan kepada investor (Richardson, 1998).

### **2.1.2 Teori *Fraud Triangel***

Teori *fraud triangle* pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Kemudian teori ini diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS no. 99, *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. *Fraud triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Turner *et al.*, 2003).

Tekanan (*pressure*) memiliki berbagai arti, yaitu keadaan di mana seseorang merasa ditekan/ tertekan dan kondisi yang berat saat seseorang menghadapi kesulitan. Kedua arti ini menunjukkan bahwa *pressure* dapat menjadi motivasi bagi seseorang dalam melakukan tindakan. Menurut SAS No.99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang

dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

*Opportunity* (Peluang) merupakan situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas. SAS No.99 menyebutkan bahwa peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori kondisi. Kondisi tersebut adalah *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. *Nature of industry* berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar. Peluang merupakan akibat dari keadaan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Transaksi pihak istimewa yang rumit yang disertai dengan risiko inheren yang tinggi karena keterlibatan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dan subjektif. Selain itu, transaksi dengan pihak istimewa yang kompleks dapat menimbulkan risiko salah saji material karena rentan terhadap manipulasi oleh manajemen.

*Rationalization* (Rasionalisasi) yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Auditor (PSA) No. 70 menunjukkan bahwa terdapat ketegangan hubungan antara manajemen dengan auditor sekarang/auditor pendahulu sebagai indikasi tindak kecurangan pelaporan keuangan. Sorenson et al., (1983) berpendapat bahwa klien bisa mengganti auditor untuk mengurangi kemungkinan deteksi kecurangan pelaporan keuangan.

### **2.1.3 Corporate Governance**

#### **2.1.3.1 Konsep Corporate Governance**

Menurut *Cadbury Committee* (1992), *Corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Turnbul Report di Inggris (1999) dalam Effendi (2009), mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola risiko, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*. Peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya fraud, sebaliknya tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan kontribusi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Wicaksono, 2015).

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan dewan komisaris.

### **2.1.3.2 Prinsip – Prinsip *Corporate Governance***

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, menetapkan prinsip-prinsip yang diharapkan perusahaan menerapkan di setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. KNKG menyebut prinsip *corporate governance* sebagai asas *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang didisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas**, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. **Responsibilitas**, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi**, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan kesetaraan** suatu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### **2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance***

Pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan bagi para pemegang saham. Menurut Siswanto Sutojo dan John Aldridge (2005), *good corporate governance* mempunyai tujuan utama:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non- pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan

Manfaat corporate governance menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) adalah:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan kompetitif baik domestik maupun internasional, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mendukung investasi.
2. Untuk mendorong manajemen perusahaan untuk berperilaku secara profesional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS.
3. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk membuat keputusan dan untuk bertindak dengan rasa moralitas yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum, dan sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai stakeholder dan perlindungan lingkungan.

Dari tujuan dan manfaat tersebut maka perusahaan yang melaksanakan dan menerapkan *good corporate governance* akan melindungi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan perusahaanpun dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

#### **2.1.4 Mekanisme Corporate Governance**

Sistem *corporate governance* pada perusahaan modern dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* dan mekanisme

*external governance* yang sifatnya beragam tergantung lingkungan tertentu yang dianjurkan (Short, Keasy, Wright dan Hull, 1999, dalam Wulan dari 2006). Guna dan Herawati (2010) mengatakan mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, keberadaan komite audit dan komisaris independen didalam perusahaan. Dengan berjalannya kedua mekanisme tersebut secara bersamaan, maka sistem *corporate governance* perusahaan mencoba memotivasi manajer agar memaksimalkan nilai pemegang saham (Alexander dan Matts, 2003) dalam Wulandari (2006).

#### **2.1.4.1 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang sekaligus sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen dalam menselaraskan kepentingannya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak hati-hati, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi tindakan manajer yang melakukan kecurangan laporan keuangan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham.

Menurut Verya (2017), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Kepemilikan manajerial dapat berperan

dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan suatu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan, Dimana manajer akan cenderung bertindak dalam kepentingan pemegang saham, antara lain dengan tidak memanipulasi informasi yang tersaji dilaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dengan adanya kepemilikan manajerial didalam perusahaan, para manajer akan mendapat tekanan untuk lebih berhati – hati dalam menyajikan laporan keuangan serta dapat memotivasi manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal. Para manajer juga akan merasa seperti memiliki perusahaan, sebab segala tindakan yang mereka lakukan di perusahaan dalam hal kebijakan manajerial, akan berdampak juga terhadap kepemilikan sahamnya didalam perusahaan.

#### **2.1.4.2 Dewan Komisaris**

Berdasarkan pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa pengertian dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga investor tetap memiliki kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan. Adanya pengawasan yang efektif dapat mengurangi kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian ini

mengukur dewan komisaris dengan menghitung jumlah keseluruhan dewan komisaris (Salim, 2017). Sama halnya yang dilakukan Wicaksono (2015) mengukur dewan komisaris dengan menghitung total keseluruhan dewan komisaris pada suatu perusahaan.

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*. Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga investor tetap memiliki kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut FCGI, tugas dari dewan komisaris antara lain:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

#### **2.1.4.3 Komite Audit**

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Dalam peraturan Kep. 29/PM/2004, perusahaan diwajibkan membentuk komite audit yang memiliki tugas, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
3. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
4. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mengadakan rapat audit yang berfungsi sebagai media komunikasi antar anggotanya dalam menerapkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Semakin sering komite audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite audit dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Prosedur rapat yang diadakan oleh komite audit telah diatur dalam keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang isinya adalah:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

#### **2.1.4.4 Kepemilikan Institusional**

Rahardi (2013) mendefinisikan kepemilikan institusi adalah kepemilikan saham oleh pihak – pihak institusi lain. Institusi dalam hal ini seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* dan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan manajer di dalam perusahaan semakin berkurang. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham (Salim 2017).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat

mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga dengan baik.

## **2.1.5 Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)**

### **2.1.5.1 Konsep *Fraud***

Pada dasarnya *fraud* merupakan tindakan ketidakjujuran yang melanggar hukum dan bisa merugikan berbagai pihak. Menurut BPK RI (2007), *fraud* adalah salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Kusumawardhani (2013), mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui

bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. *Fraud* merupakan kesengajaan dalam menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit (SAS no. 99).

Menurut Wicaksono (2015) *fraud* berarti suatu item yang tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan *fraud*. *Fraud* merupakan sesuatu yang sangat sulit diberantas karena dilakukan dengan sistematis sehingga diperlukan pula penanganan yang sistematis. Akan tetapi, *fraud* bisa dicegah atau setidaknya bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti *fraud*.

#### **2.1.5.2 Jenis *Fraud***

Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) dalam Kusumawardhani (2013), kecurangan terbagi dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*) yaitu penyalahgunaan/pencurian aset perusahaan atau pihak lain.
2. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*) yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau dengan istilah window dressing.

3. Korupsi (*Corruption*) yaitu jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dan saling menikmati keuntungan. *Fraud* jenis ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

#### **2.1.5.3 Konsep Kecurangan Laporan Keuangan**

Kecurangan pelaporan keuangan menurut ACFE (2010) adalah tindakan yang dilakukan pejabat secara sengaja atas informasi yang material dengan tujuan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan sebenarnya dan akan memberikan suatu keuntungan bagi pihak yang melakukan kecurangan. Namun, kecurangan dalam bentuk salah saji material laporan keuangan akan merugikan investor dan kreditor (ACFE, 2010). Apabila seseorang telah terbukti melakukan kecurangan, maka dia akan mencari alasan agar ia tidak disalahkan. Hal ini biasa disebut dengan pembenaran (*rationalization*).

Rezaee (2005, dalam salim 2017) mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Manipulasi keuntungan

(*earning manipulation*) disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor .

Menurut SAS no. 99, kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.
2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Kecurangan laporan keuangan merupakan kesengajaan ataupun kelalaian dalam pelaporan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Menurut Wells, 2011 (dalam Sihombing, 2014) kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus, antara lain:

1. Pemalsuan, pengubahan, atau manipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan.
3. Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.

4. Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan (Rezaee, 2002).

#### 2.1.6 Beneish M-Score

Kecurangan pelaporan keuangan menurut ACFE (2010) adalah tindakan yang dilakukan pejabat secara sengaja atas informasi yang material dengan tujuan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan sebenarnya dan akan memberikan suatu keuntungan bagi pihak yang melakukan kecurangan. Untuk mengklasifikasikan perusahaan *fraud* dan *non fraud* menggunakan metode *beneish m-score model*. Metode ini adalah metode untuk mengukur tinggi-rendahnya kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi pada pendapatannya (beneish, 2012). Jika *beneish m-score* lebih besar dari -2.22 mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi. Sebaliknya, jika nilai *m-score* perusahaan lebih kecil -2.22, maka perusahaan tersebut tidak diindikasikan melakukan manipulasi pada pendapatannya.

Perusahaan yang dikategorikan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dilihat menggunakan model *beneish m-score* yang terdiri dari rasio-rasio pada laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan tersebut adalah *Days Sales Inreceivables Index*, *Gross Margin Index*, *Asset Quality Index*, *Sales Growth Index*, *Total Accrual To Total Assets*, *Depreciation Index*, *Sales General And Administrative Expenses Index*.

Model *beneish m-score* yang digunakan oleh beneish *et al.* (2012) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{M-Score} = & -4.840 + 0.920\text{DSRI} + 0.528\text{GMI} + 0.404\text{AQI} \\ & + 0.892\text{SGI} + 0.115\text{DEPI} - 0.172\text{SGAI} - \\ & 0.327\text{LVGI} + 4.679\text{TATA} \end{aligned}$$

1. *Days sales in receivables index* (DSRI) adalah indeks jumlah hari dalam penerimaan hasil piutang atas penjualan. Menurut Kartika dan Irianto (2010), rasio ini membandingkan piutang usaha terhadap penjualan yang dihasilkan perusahaan pada suatu tahun (t) dan tahun sebelumnya (t<sub>1</sub>). Kenaikan yang besar pada DSRI merupakan hasil dari perubahan dalam kebijakan kredit untuk meningkatkan penjualan dalam menghadapi persaingan yang ada. Tetapi, ketidakseimbangan pada peningkatan piutang secara relatif terhadap penjualan dapat mengindikasikan adanya lonjakan pendapatan. Sehingga, kenaikan yang cenderung besar pada DSRI memiliki keterkaitan adanya kemungkinan pencatatan penjualan dan pendapatan yang terlalu besar. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{DSRI} = \frac{\text{Piutang usaha}_{(t)} / \text{Penjualan}_{(t)}}{\text{Piutang usaha}_{(t-1)} / \text{Penjualan}_{(t-1)}}$$

Beneish (1999) menyatakan bahwa jika  $\text{DSRI} > 1$ , maka hal ini menunjukkan adanya peningkatan atas jumlah piutang usaha yang dimiliki. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya manipulasi laba.

2. *Gross Margin Index* (GMI) adalah indeks atas laba kotor. Menurut Kartika dan Irianto (2010), Indeks atas laba kotor merupakan rasio yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, rasio ini merepresentasikan prospek perusahaan di masa depan. Beneish (1999) menyatakan bahwa

jika  $GMI > 1$ , maka hal ini menunjukkan terjadinya penurunan atas laba kotor perusahaan yang mempresentasikan prospek perusahaan yang mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya manipulasi laba. Rumus perhitungannya adalah:

$$GMI = \frac{\text{Laba kotor}_{(t-1)} / \text{Penjualan}_{(t-1)}}{\text{Laba kotor}_{(t)} / \text{Penjualan}_{(t)}}$$

3. *Asset Quality Index* (AQI) adalah indeks atas kualitas aset. Menurut Kartika dan Irianto (2010), AQI menunjukkan kualitas aktiva tidak lancar perusahaan yang kemungkinan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan. Beneish (1999) menyatakan bahwa jika  $AQI > 1$ , maka hal ini menunjukkan terjadinya penurunan atas kualitas aktiva. Dengan demikian terjadi peningkatan atas jumlah aktiva tidak lancar yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan peningkatan jumlah beban yang ditanggungkan. Beneish (1999) menyatakan bahwa kondisi ini mengindikasikan terjadinya manipulasi laba. Rumus perhitungannya adalah:

$$AQI = \frac{1 - \frac{\text{Aktiva lancar}_{(t)} + \text{Aktiva tetap}_{(t)}}{\text{Total aktiva}_{(t)}}}{1 - \frac{\text{Aktiva lancar}_{(t-1)} + \text{Aktiva tetap}_{(t-1)}}{\text{Total aktiva}_{(t-1)}}}$$

4. *Sales Growth Index* (SGI) adalah indeks atas pertumbuhan penjualan. Menurut Kartika dan Irianto (2010), Jika  $SGI > 1$ , maka hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan atas penjualan, sedangkan penurunan atas rasio ini menunjukkan adanya penurunan atas penjualan. Jika  $SGI > 1$ , maka hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan atas

penjualan, sedangkan penurunan atas rasio ini menunjukkan adanya penurunan atas penjualan. Oleh karena itu, Beneish (1999) menyatakan bahwa jika  $SGI > 1$ , maka hal ini mengindikasikan terjadinya manipulasi laba. Rumus perhitungannya adalah:

$$SGI = \frac{\text{Penjualan}_{(t)}}{\text{Piutang usaha}_{(t-1)}}$$

5. *Depreciation Index* (DEPI) adalah Indeks atas beban depresiasi. Menurut Kartika dan Irianto (2010), rasio ini membandingkan beban depresiasi terhadap aktiva tetap sebelum depresiasi pada suatu tahun (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Jika  $DEPI > 1$ , maka hal ini menunjukkan terjadinya penurunan atas depresiasi aktiva tetap sedangkan penurunan atas rasio ini menunjukkan adanya peningkatan atas tingkat depresiasi aktiva tetap. Oleh karena itu, Beneish (1999) menyatakan bahwa jika  $DEPI > 1$ , maka hal ini mengindikasikan terjadinya manipulasi laba.

Rumus perhitungannya adalah:

$$DEPI = \frac{\frac{\text{Depresiasi}_{(t-1)}}{\text{Depresiasi}_{(t-1)} + \text{Aktiva tetap}_{(t-1)}}}{\frac{\text{Depresiasi}_{(t)}}{\text{Depresiasi}_{(t)} + \text{Aktiva tetap}_{(t)}}}$$

6. *Sales General and Administrative Expenses Index* (SGAI) adalah Indeks atas beban penjualan, umum, dan administrasi (SGAI) Rasio ini membandingkan beban penjualan, umum, dan administrasi terhadap penjualan pada suatu tahun (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Beneish (1999) menyatakan bahwa jika  $SGAI < 1$ , maka hal ini mengindikasikan terjadinya manipulasi laba. Rumus perhitungannya adalah:

$$SGAI = \frac{\frac{SGAI_{(t)}}{Penjualan_{(t)}}}{\frac{SGAI_{(t-1)}}{Penjualan_{(t-1)}}$$

7. *Leverage Index* (LVGI) adalah indeks atas tingkat hutang. Rasio ini membandingkan jumlah hutang terhadap total aktiva pada suatu tahun dan tahun sebelumnya. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat hutang yang akan dimiliki perusahaan terhadap total aktiva dari tahun ke tahun. Beneish (1999) menyatakan bahwa jika LVGI >1, maka hal ini mengindikasikan kondisi perusahaan yang potensial atas terjadinya manipulasi laba. Rumus perhitungannya adalah:

$$LVGI = \frac{\frac{\text{Total kewajiban}_{(t)}}{\text{Total aktiva}_{(t)}}}{\frac{\text{Total kewajiban}_{(t-1)}}{\text{Total aktiva}_{(t-1)}}$$

8. *Total Accruals to Total Assets* (TATA) adalah Indeks atas Total AkruaI terhadap Total Aktiva (Total Accruals to Total Assets). Menurut Kartika dan Irianto (2010), total akruaI yang tinggi menunjukkan tingginya jumlah laba akruaI yang dimiliki oleh perusahaan. Jika akruaI bernilai positif ada kemungkinan manipulasi pendapatan yang lebih tinggi.

$$TATA = \frac{\text{Laba usaha}_{(t)} - \text{Arus kas dari aktivitas operasi}_{(t)}}{\text{Total aktiva}_{(t)}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *corporate governance* dan kecurangan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini tentunya peneliti membutuhkan penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya agar dapat diketahui apakah penelitian ini sangat berpengaruh dan

mendukung atau tidak dalam penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

**-Tabel 1.  
Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wicaksono, G.S (2015)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan	Variabel Dependen: Kecurangan dalam pelaporan keuangan Variabel Independen: Mekanisme <i>Corporate Governance</i> yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan efektivitas audit internal.	Ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.
2.	Salim (2017)	Pengaruh manajemen laba dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan	Variabel Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Variabel Independen: Manajemen laba, dan mekanisme <i>corporate governance</i>	1. Manajemen laba berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. 2. mekanisme <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
3.	Ismiyanti & Prastichia	Mekanisme <i>Corporate</i>	Variabel Dependen:	1. Variabel jumlah dewan

	(2015)	<i>Governance</i> dan Kecurangan Laporan Keuangan	Kecurangan Laporan Keuangan Variabel Independen: Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	komisaris berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.
4.	Dwiputri & Soepriyanto (2013)	Analisis pengaruh pengungkapan etika dan unsur <i>good corporate governance</i> terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan.	Variabel Dependen: kecurangan laporan keuangan Variabel Independen: Pengungkapan etika, komite audit independen, komisaris independen, kepemilikan manajerial, EPS, reputasi kantor	Pengungkapan etika, komite audit independen, reputasi kantor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, EPS, berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan
5.	Kartikasari & Irianto (2010)	Penerapan Model Beneish (1999) dan Model Altman (2000) dalam pendeteksian kecurangan	Variabel Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Variabel	Model Beneish dan Model Altman dapat diterapkan dalam mendeteksi

		laporan keuangan	Independen: Model Beneish (1999) dan Model Altman (2000)	kecurangan laporan keuangan
--	--	------------------	--	-----------------------------

Sumber: Diolah dari berbagai literatur

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah keterkaitan maupun hubungan antara variabel yang diteliti yang diuraikan berdasarkan kajian teori diatas.

Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial juga akan mengurangi masalah keagenan, karena kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan insentif manajemen dengan pemegang saham (Prasetyo, 2011). Kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak agen (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menguji kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian dari Dwiputri dan Soepriyanto (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial

yang lebih tinggi dapat dilihat sebagai mekanisme untuk membatasi perilaku oportunistik dan adanya kecurangan diperkirakan akan berhubungan negatif dengan kepemilikan saham manajerial.

Dalam teori agensi, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan antara *agent* dengan *principal*. Pendelegasian tugas dari principal kepada agent membuat principal tidak dapat mengawasi kinerja manajer secara menyeluruh, sehingga tercipta suatu kondisi asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, dewan komisaris dibentuk untuk ditugaskan dan diberi tanggung atas jawab pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menguji pengaruh dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2017) menguji pengaruh dewan komisaris terhadap kecurangan pelaporan keuangan yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya dewan komisaris yang semakin banyak akan mengurangi adanya kemungkinan terjadi kecurangan pelaporan keuangan.

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan permasalahan yang sering disebut dengan *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Penerapan mekanisme *corporate governance*, yang salah satunya adalah komite audit, merupakan salah satu cara untuk mengatasi terjadinya *agency problem*. Dengan adanya komite audit diharapkan tidak terjadi *fraud* dan menyeimbangkan informasi yang diperoleh *principal* dan *agent*.

Bapepam (2004) mensyaratkan komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh dewan komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Selain itu, Bapepam juga menghimbau bahwa setidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan. Oleh karena itu, semakin sering komite audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite audit dalam melakukan fungsi pengawasannya.

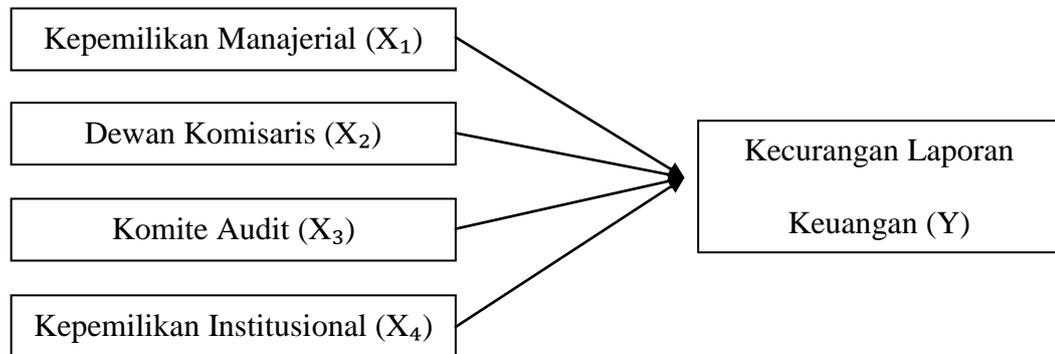
Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menguji pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang berarti semakin tinggi proporsi komite audit maka semakin rendah tingkatnya kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* dan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan manajer di dalam perusahaan semakin berkurang. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menguji kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan Verya (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Karena tingginya saham yang dimiliki oleh instansi luar maka bisa dilihat pula perusahaan itu mempunyai nama yang besar.

Berdasarkan masalah yang dianalisis tersebut, maka secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dirumuskan dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**-Gambar 1.  
Kerangka Konseptual**



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

H<sub>2</sub> : Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

H<sub>3</sub> : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

H<sub>4</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini ingin melihat apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil pengujian dengan regresi logistik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. 17% variasi kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional. 83% (100%-17%) variasi kecurangan laporan keuangan lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
- b. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendah saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan.
- c. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak dewan komisaris diperusahaan maka akan semakin rumit, sehingga dapat memberi celah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.
- d. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena hasil rapat dari komite audit disampaikan

kepada dewan komisaris, sehingga tergantung dari dewan komisaris melakukan tindak lanjut atas saran komite audit atau tidak.

- e. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini terjadi karena pihak institusi luar masih belum berperan aktif dalam megawasi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hasil penelitian ini hanya memperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,017 atau variabel kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel *corporate governance* hanya sebesar 17% yang berarti 83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
- b. *Corporate governance* dalam penelitian ini hanya diproksikan dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penggunaan empat variabel ini belum cukup mencerminkan *corporate governance* perusahaan secara keseluruhan.
- c. Variabel kepemilikan manajerial yang digunakan dalam penelitian ini hanya digambarkan melalui jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan per jumlah saham yang beredar.
- d. Variabel fungsi pengawasan dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini hanya digambarkan melalui jumlah anggota dewan komisaris.

- e. Pengukuran komite audit hanya didasarkan pada informasi yang diperoleh peneliti dari laporan tahunan perusahaan, yaitu dengan jumlah rapat komite audit yang dilakukan perusahaan selama satu tahun.
- f. Variabel kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian ini hanya digambarkan melalui jumlah saham yang dimiliki pihak institusi luar perusahaan per jumlah saham yang beredar.

### 5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Variabel yang digunakan untuk mencerminkan *corporate governance* dapat dikembangkan lebih lanjut seperti menambahkan variabel lain yang dapat menggambarkan mekanisme *corporate governance* secara menyeluruh.
- b. Variabel dewan komisaris sebagai fungsi pengawas perusahaan juga dapat dilakukan lebih efektif dengan menggunakan faktor-faktor aktivitas, independensi dan kompetensi dewan komisaris, agar pengawasan perusahaan lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- AICPA, SAS No. 99. 2012. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, AICPA. New York
- Assosiation of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2010. *Report on the Nation on Occupational Fraud & Abuse*. Diakses: <http://www.cfenet.com/acfefraud.2010.pdf/>
- Beneish, M.D. 1999. *The Detection of Earnings Manipulation*. Financial Analysis Journal
- \_\_\_\_\_. 2012. *Fraud Detection and Expected Returns*. Diakses: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1998387/](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1998387/).
- Boediono, G S. B. 2005. "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisa Jalur," Simposium Nasional Akuntansi VIII, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- BPK RI. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cadbury Committee. 1992. *Report of The Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee
- Dewi, Laurensia Chintia dan Nugrahanti, Yeterina Widi. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2011-2013). *Jurnal Kinerja*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Dwiputri, Intan Izzati dan Soepriyanto, Gatot. 2013. Analisis Pengaruh Pengungkapan Etika dan *Unsur Good Corporate Governance* Terhadap Kemungkinan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal*. Jakarta. Universitas Binus.
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- FCGI. 2001. "Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan" Edisi Ketiga, Jakarta

- \_\_\_\_\_. 2002. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan). Diakses: [https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi\\_booklet\\_ii.pdf](https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_ii.pdf)
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2011. Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guna, W.I dan Herawaty, A. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Inependensi Auditor, Kualitas Audit dan Fakto Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan Jakarta : IAI
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2011, Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70: Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan, Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta.
- Ismiyanti, F. dan Prastichia, C. 2015. “Mekanisme *Corporate Governance* dan Kecurangan Laporan Keuangan”.
- Jackson et al. 2009. “*The Association Between Audit Committee Characteristics, the Contracting Process and Fraudulent Financial Reporting*”. *American Journal of Business*. Vol.24, No.1.
- Jensen, Michael, C, dan Meckling, William, H. 1976. “*Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*”. *Journal of Financial Economics*. Vol 3.
- Johnson, S., Boone, P., Breach, A. Friedman, E. 2000. *Corporate Governance in the Asian Financial Crisis*. *Journal of Financial Economics*, 58: 141-186.
- Kartikasari, R. N., dan Irianto, G. 2010. “Penerapan model beneish (1999) dan model altman (2000) dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan”.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No : Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No : Kep-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta.
- Kusumawardhani, Prisca. 2013. Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangel pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3
- Nasution, M. dan Setyawan. D. 2007. "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Prasetyo, Arief. 2009. *Corporate Governance, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2007*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahardi, Tegar. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba. Universitas Diponegoro.
- Richardson, Vernon J. 1998. "*Information Asymmetry an Earnings Management: Some Evidence*". *Working Paper*. Diakses : <http://www.ssrn.com/>
- Salim, Hayyuroza Sofyan. 2017. Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2015). Universitas Bengkulu.
- Skousen, C. J., K. R. Smith, dan C. J. Wright. 2009. "Detecting and Predecting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99." *Corporate Governance and Firm Performance Advances in Financial Economis*, Vol. 13, h. 53-81.
- Statement of Financial Accounting Concept No.1. 2008. Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises.*
- Sihombing, K. S. 2014. Analisis fraud diamond dalam mendeteksi *financial statement fraud* : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Sorenson, J.E., D. Grove, & F.H. Selto. 1983. Detecting Manajemen Fraud : An Empirical Approach. *Symposium on Auditing Research*. Vol. 5 : 73-176
- Sutojo, Siswanto dan E. Jhon Aldridge. 2005. *Good Corporate Governance*.

Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.

Susiana dan Herawaty, "Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan" Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 juli 2007.

Syamsudin et al. 2017. Tata Kelola Korporasi Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Triani, Hajar Melinda. 2017. Analisis Kasus *Fraud* PT Waskita Karya. Universitas Islam Indonesia.

Turner, J.L., T.J. Mock, R.P. Sripastava. 2003. "An Analysis of the Fraud Triangel". The University of Memphis, University of Southern California, University of Cansas.

Ujiyantho. M. Arief dan Pramuka. B. Agus. 2007. "Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan". Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108. Verya, Endy. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Universitas Riau.

Verya, Endi. 2017. "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Good Corporation* terhadap Integritas Laporan Keuangan. JOM Fekom. Vol.4 No-1

Wicaksono, Satrio Gregorius. 2015. mekanisme *corporate governance* dan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Semarang. Universitas Diponegoro.

Wulandari, Ndaruningputri. 2006. Pengaruh Indikator Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang.

<https://finance.detik.com/>

<https://investasi.kontan.co.id/>